

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. (1997). *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Abidin, A. Z. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *JURNAL ILMU HUKUM*, 5(2). Retrieved from Dosen Fakultas Hukum Universitas Raja Ali Haji
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- BatamNews. (2018). Sosok Kepala Sekolah SMPN 10 Tersangka OTT Di Mata Para Siswa. *BatamNews*.
- Davud Berry. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dosenpendidikan.com. (2020a). Pengertian Lembaga Pendidikan.
- Dosenpendidikan.com. (2020b). Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli.
- Edwira, M. R. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung). *Jurnal Skripsi*. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1119/942>
- Farouk Muhammad. (2003). *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: Restu Agung.

- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Humas Inspektorat. (2017). *Inspektorat BPKP Waspadai Pungli*. Jakarta.
- Hutapea, J. A. (2016). Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Uu. Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam Uu. Ri Nomor 20 Tahun 2001). *Jurnal Nestor Magister Hukum, 1*(1).
- Jaya Tarigan. (2020). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan Kota Batam*. Polresta Bareleng.
- Kumendong, W. J. (2017). Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. *Lex Privatum, Vol. V*.
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Lijan Poltak Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Malau, P. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan, 7*(1).
- Mien Rukmini. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka-LP3ES.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris &*

- Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasional, D. P. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed., p. 854). Jakarta: Balai Pustaka.
- P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Patoni, A. (2007). *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodipuro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar* (7th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. dan B. S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Kelima). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudut Hukum. (2017). Pengertian Pungutan Liar.
- Svinarky, I. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Cahaya Keadilan*, 4(2).
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Perss.
- Ukas Ibrahim. (2015). Analisis Yuridis Pemahaman Utilitarisme Etika dan Profesi Hukum. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2).
- Wahyu Ramadhani. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Peraturan Presiden Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar